

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

2.1.1 Kondisi Geografis Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang terletak di tengah Pulau Jawa, provinsi ini terletak di 5°40' - 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' - 111°30' Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 3.254.412 ha atau 25,04% dari luas Pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, 537 Kecamatan yang meliputi 7.809 Desa dan 753 Kelurahan.



Gambar 2.1 Peta Provinsi Jawa Tengah

Sumber: <https://www.lamudi.co.id/journal/peta-jawa-tengah>

Dilihat dari gambar peta administrasi Provinsi Jawa Tengah di atas. Batas-batas administrasi wilayah Provinsi Jawa Tengah yaitu:

- a. Di sebelah utara, wilayah ini berhadapan langsung dengan Laut Jawa.
- b. Di sebelah barat, berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat.
- c. Di bagian selatan, berbatasan dengan Samudera Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. Di sisi timur, berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur.

2.2 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

BKD Provinsi Jawa Tengah adalah instansi pemerintah yang mengelola sumber daya manusia di lingkungan pemerintah provinsi. Badan Kepegawaian Daerah berperan penting dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan serta program yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian. Fungsi utama Badan Kepegawaian Daerah yaitu mendukung pelaksanaan tugas Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk membentuk ASN yang kompeten, berintegritas, netral, dan bermoral.





Gambar 2.2 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas utama antara lain:

- a. Menempatkan PNS dalam jabatan yang sesuai;
- b. Menyusun Daftar Susunan Pegawai (DSP) untuk setiap SKPD;
- c. Menyusun dan menetapkan formasi bagi PNS, CPNS, dan PPT;
- d. Melaksanakan proses pengadaan CPNS dan PPT;
- e. Menganalisis serta merancang program pendidikan dan pelatihan (Diklat);
- f. Melakukan pengukuran kompetensi jabatan;
- g. Mengevaluasi kinerja pegawai;
- h. Mengurus pengangkatan, kepangkatan, dan pemindahan PNS;
- i. Menangani proses pemberhentian PNS;
- j. Mengelola kesejahteraan pegawai negeri;
- k. Membina hak, kewajiban, serta pemberian penghargaan bagi PNS;
- l. Mengurus arsip dan dokumen kepegawaian;
- m. Mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di tingkat daerah,
serta
- n. Menyediakan layanan internal bagi BKD sendiri.

2.2.1 Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki visi “ Menjadi Pengelola Manajemen Kepegawaian Yang Profesional dan Unggul”. Dalam mewujudkan visi sebagaimana tertulis di atas, maka perlu suatu misi untuk mencapai sasaran yang akan dituju dalam waktu tertentu. Berdasarkan Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah 2024-2026, misi utama dalam pengelolaan kepegawaian meliputi:

1. Perencanaan dan pengembangan pegawai yang objektif dan transparan;
2. Pelaksanaan mutasi kepegawaian yang akurat dan terukur;
3. Peningkatan kualitas pegawai melalui pengukuran kompetensi dan penilaian kinerja;
4. Peningkatan disiplin dan kesejahteraan serta pelaksanaan netralitas pegawai;
5. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian yang akurat dan terintegrasi;
6. Peningkatan tertib administrasi dan layanan prima kepegawaian.

Hal ini sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” (TETEP) dengan prinsip *Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*. Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, khususnya di bidang pengelolaan pegawai, BKD Provinsi Jawa Tengah mengembangkan inovasi berupa Aplikasi Sinaga. Selain itu, inovasi Sinaga ini diciptakan untuk menunjang kebutuhan pegawai salah satunya dalam hal absensi pegawai.

2.2.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan sebuah organisasi. Walaupun jumlah pegawai terbatas, hal ini tidak menjadi penghalang asalkan sumber daya yang tersedia dikelola secara bijaksana. Keberagaman tingkat pendidikan dan rentang usia pegawai menjadi salah satu modal penting bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yang didukung oleh jumlah pegawai terdiri 159 pegawai, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah PNS BKD Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin 2023

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
1.	Pria	93 Pegawai
2.	Wanita	66 Pegawai
	Total	159 Pegawai

Sumber: Resntra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

Tabel 2.1 yang disajikan menggambarkan jumlah pegawai di BKD Provinsi Jawa Tengah berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2023. Total pegawai yang tercatat adalah 159 orang, dengan rincian 93 pegawai pria dan 66 pegawai wanita. Data ini menunjukkan bahwa komposisi pegawai di BKD Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh pegawai pria, yang mencapai lebih dari 50% dari total pegawai. Meski demikian, jumlah pegawai wanita yang tercatat cukup signifikan, dengan proporsi sekitar 41,5%.

Tabel 2.2 Jumlah PNS BKD Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Pendidikan	Jumlah
1.	SD	2
2.	SMP	1
3.	SMA	16
4.	Sarmud/DIII	12
5.	D4	14
6.	STRATA 1	67
7.	STRATA 2	47
8.	STRATA 3	0
	Total	159

Sumber: Resntra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

. Berdasarkan tabel 2.2, bahwa pada tahun 2023 pegawai dengan pendidikan terakhir Diploma 4 dengan total 14 orang, S1 dengan total 67 orang. Selain itu, terdapat 16 pegawai berpendidikan SMA, sementara pegawai dengan tingkat pendidikan S2 mencapai 47 orang, kemudian DIII dengan total 12 orang. Untuk jenjang SD, SMP, dan S3, jumlahnya relatif sedikit.

2.2.3 Tugas dan Fungsi Bidang Informasi Kepegawaian (INKA)

Bidang Informasi dan Kepegawaian (INKA), berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKD Provinsi Jawa Tengah, bertugas dalam penyusunan kebijakan, koordinasi, serta pelaksanaan kebijakan. Selain itu, bidang ini juga bertanggung jawab atas

evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan pembangunan dalam pengelolaan data, sistem informasi, serta dokumentasi kepegawaian.

A. Sub Koordinator Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kepegawaian bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, Mengoordinasikan serta melaksanakan kebijakan, serta melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidangnya. Tanggung jawabnya mencakup:

1. Menyusun rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran terkait pengelolaan data serta sistem informasi kepegawaian;
2. Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan data dan sistem informasi kepegawaian;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas serta pembinaan teknis di bidang pengelolaan data dan sistem informasi kepegawaian;
4. Mengelola sistem informasi kepegawaian;
5. Mengelola sistem informasi terkait penggajian serta tunjangan kinerja Aparatur Sipil Negara menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan presensi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
6. Mengelola sistem presensi bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
7. Menyusun bahan untuk mengawasi proses pemutakhiran data pegawai di tingkat daerah;
8. Menyiapkan materi dalam pelaksanaan rekonsiliasi data kepegawaian dengan BKN;

9. Mengumpulkan bahan serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait tugas dukungan teknis di lingkungan instansi;

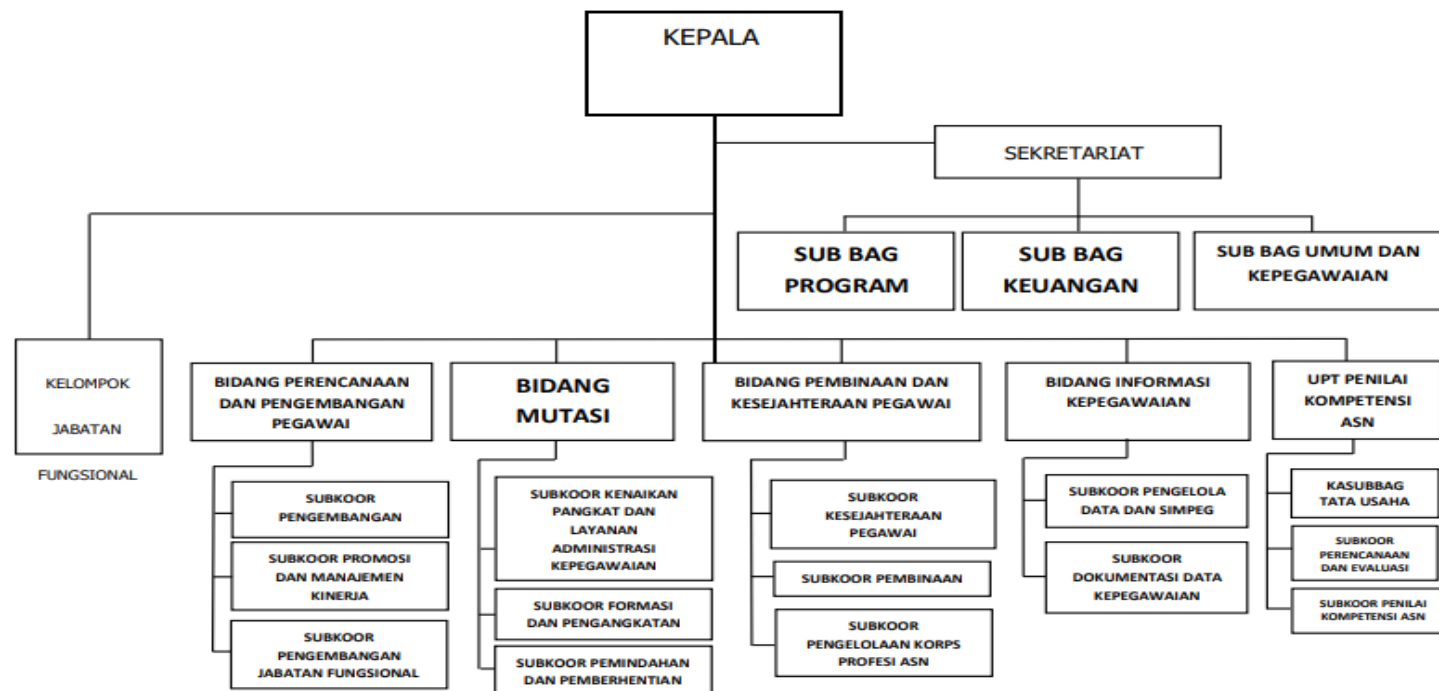
B. Sub Koordinator Dokumentasi Data Kepegawaian, bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, Mengoordinasikan serta melaksanakan kebijakan, melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Dokumentasi Data Kepegawaian. Tugasnya mencakup:

1. Menyusun bahan untuk perencanaan kerja, program, kegiatan, serta anggaran di bidang Dokumentasi Data Kepegawaian;
2. Mempersiapkan bahan dalam penyusunan kebijakan teknis terkait dokumentasi data kepegawaian;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas serta pembinaan teknis di bidang dokumentasi data kepegawaian;
4. Mengelola dokumen kepegawaian dalam bentuk tekstual maupun elektronik;
5. Melakukan pengawasan terhadap proses pengelolaan rekapitulasi data kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkup pemerintah daerah dan kabupaten/kota;
6. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan terkait pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan instansi;

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan.

Melalui tupoksi dari Sub koordinator Bidang Informasi Kepegawaian (INKA), yaitu sub koordinator pengelolaan data dan sistem informasi kepegawaian serta sub koordinator dokumentasi data kepegawaian. Dalam menjalankan pelaksanaan absensi online Sinaga berjalan sesuai tugas dan fungsi masing-masing sub koordinator. Fungsi-fungsi ini memastikan bahwa pengelolaan presensi berbasis elektronik sejalan dengan tujuan digitalisasi sistem kepegawaian dan peningkatan akuntabilitas OPD di lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

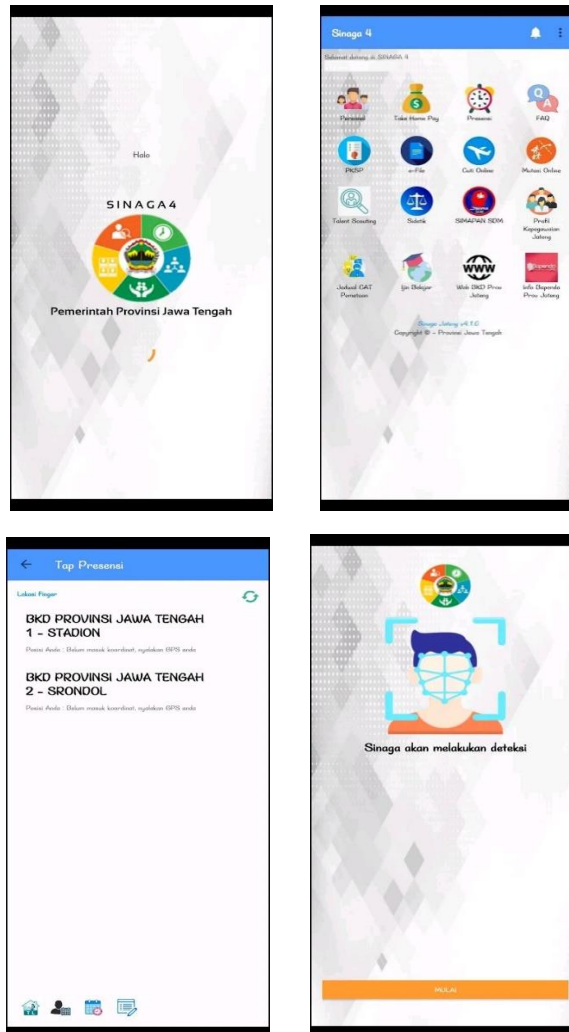
2.2.4 Struktur Organisasi



Gambar 2.3 Bagan Organisasi BKD Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

2.3 Inovasi Absensi online “Sinaga”



Gambar 2.4 Layout Sampul dan Fitur Aplikasi Sinaga

Dari gambar 2.4 menampilkan aplikasi Sinaga, aplikasi ini memiliki berbagai fitur yang menunjang kebutuhan pegawai, salah satunya mengenai presensi di dalamnya menampilkan titik lokasi presensi pegawai sesuai dengan instansi penempatan. Selain itu, pada presensi ini terdapat menu pilihan mengenai rekap data kehadiran, sehingga mempermudah pegawai mengamati mengenai status kehadiran perhari. Salah satu fitur unggulannya yaitu autentifikasi wajah yang memastikan proses absensi lebih aman dan hanya dapat dilakukan oleh pegawai

yang terverifikasi. Dengan fitur-fitur tersebut, aplikasi Sinaga membantu menciptakan sistem absensi yang lebih modern, efisien, akurat dan transparan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.

Apabila dikomparasikan dengan inovasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yaitu “SIKO”, inovasi absensi Sinaga milik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan inovasi aplikasi yang unik. Kedua inovasi absensi online tersebut memiliki kesamaan yaitu menggunakan GPS, sedangkan absensi online Sinaga memiliki fitur pelengkap yaitu adanya autentifikasi wajah, sehingga data lebih akurat.